



# PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RDTR WILAYAH PERENCANAAN SELATAN KOTA DENPASAR

Community Participation in the Formation of RDTR for the Southern Region of Kota Denpasar

Oleh: **Eka Lestari**<sup>1</sup>, **Ni Putu Pandawani**<sup>2</sup>, **I GD. Yudha Partama**<sup>3\*</sup> | **Ketut Widnyana**<sup>4</sup>

## Abstract

This research aims to develop a strategy to increase community participation in instigating a Detailed Spatial Plan (RDTR) for the Southern Region of Kota Denpasar to minimize deviations during its implementation. This research used a mixed method, preceded by a qualitative data collection, and then progressed to a quantitative data collection. Distribution of questionnaires aided both started in January and ended in May 2024. Three forms of analysis are used: qualitative descriptive analysis, interval analysis, and SWOT. Study findings show that the stage of community participation falls into the category of consultation level - the fourth step on Arnstein's participation ladder. This is included in the degree of tokenism category. Based on the internal-external (IE) matrix analysis results in SWOT, the position of community participation is in cell II. The appropriate strategy to be used is the growth and development strategy. At this stage, the required actions are either intensive (information, dissemination, strengthening regulations, and innovation) or integrative (controlling information, strengthening human resource capacity, and cooperation/partnership). This research also leads to a range of opportunities to conduct further studies discussing community participation in policy conformance, land utilization control, and the application of e-participation and partnership.

*Keywords:* participation; spatial planning[ RDTR; level of participation; Internal-External (IE) matrix

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi peningkatan peran serta masyarakat di dalam tahap penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Selatan Kota Denpasar, dalam rangka meminimalisir terjadinya simpangan saat implementasi. Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*) yang diawali dengan pengumpulan data kualitatif, dan kemudian dilanjutkan dengan perolehan data kuantitatif. Proses pengumpulan data dibantu oleh penyebaran kuesioner yang dimulai di bulan Januari dan berakhir di bulan Mei 2024. Ada tiga frame analisis yang diterapkan, yaitu analisis deskriptif kualitatif, analisis interval dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada *level consultation* yaitu tangga keempat dari tingkatan partisipasi Arnstein yang masuk dalam kategori *degree of tokenism*. Berdasarkan hasil analisis matrik internal-eksternal (IE) dalam SWOT, posisi peran serta masyarakat berada di sel II dimana strategi yang tepat digunakan yaitu strategi tumbuh dan membangun. Di dalam tahapan ini, aksi yang disyaratkan yaitu bersifat intensif (penyebarluasan informasi, penguatan regulasi, dan inovasi) atau integratif (memegang kendali informasi, penguatan kapasitas SDM, dan kerjasama/*partnership*). Penelitian ini juga membuka peluang untuk beberapa studi lanjutan yang mendalami peran serta masyarakat pada tahap pentaatan kebijakan, pengendalian pemanfaatan ruang serta penerapan *e-participation* dan *partnership*.

*Kata kunci:* peran serta masyarakat; tata ruang; RDTR, tingkat partisipasi; matrik Internal-Eksternal (IE)

- 
- <sup>1</sup> Program Pascasarjana Magister Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Universitas Mahasaraswati  
Email: mamanyaniya@gmail.com
  - <sup>2</sup> Program Pascasarjana Magister Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Universitas Mahasaraswati  
Email: pandawaniputu@unmas.ac.id
  - <sup>3</sup> Program Pascasarjana Magister Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Universitas Mahasaraswati  
Email: yudhapartama@unmas.ac.id
  - <sup>4</sup> Program Pascasarjana Magister Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Universitas Mahasaraswati  
Email: widnyanaketut@unmas.ac.id

## Pendahuluan

RDTR WP Selatan saat ini sudah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan Walikota Denpasar No. 8 Tahun 2023 tentang RDTR WP Selatan. Wilayah administrasi RDTR WP Selatan mencakup seluruh wilayah administrasi Kecamatan Denpasar Selatan. Kecamatan Denpasar Selatan memiliki letak yang sangat strategis yaitu di bagian Selatan Wilayah Kota Denpasar dimana magnet perekonomian berkumpul di sana. Kawasan Sanur sebagai Kawasan wisata andalan Kota Denpasar merupakan daya tarik pekerja migran. Sektor pariwisata terutama pajak hotel dan restoran menjadi penyumbang terbesar dari PDRB Kota Denpasar Tahun 2022 yaitu 11.432,03 miliar rupiah atau 21% (Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2023). Pesatnya perkembangan pariwisata di Bali juga menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan ruang-ruang pendukung kegiatan bidang pariwisata (Ogiana & Sri Ronita Dewi, 2021). Kebutuhan ruang pendukung tersebut diantaranya kawasan permukiman dan perdagangan dan jasa. Zona perdagangan seluas 46.07 ha pada tahun 2014 meningkat signifikan menjadi 287.47 ha pada tahun 2017 atau 242% (Pratiwi & Citra, 2019).

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, membawa konsekuensi tingginya tuntutan akan ruang untuk dimanfaatkan sebagai tempat hunian (Pratiwi & Citra, 2019). Perluasan kawasan permukiman meningkat. Alih fungsi lahan terus terjadi. Data Dinas Pertanian Kota Denpasar menggambarkan alih fungsi lahan dari tahun 2016 sampai tahun 2022 adalah 23,45%. Kota Denpasar kehilangan 573 ha sawahnya (*World Resource Institute*, 2023). Pelanggaran pemanfaatan ruang terbesar terjadi pada zona pertanian. Luas lahan pertanian direncanakan dalam pola ruang RTRW seluas 1.459,65 ha. Data Neraca Pemanfaatan Lahan Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2023 menunjukkan indikasi simpangan pada kawasan pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan seluas 76,15 ha, disusul Kecamatan Denpasar Utara seluas 32 ha, Denpasar Barat seluas 4,26 ha, dan Denpasar Timur seluas 45,59 ha. Pelanggaran peruntukan pada zona pertanian mendominasi sebesar 96% dari pelanggaran peruntukan pada zona lainnya di Kecamatan Denpasar Selatan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023).

Masyarakat tetap membangun walaupun sudah ada papan informasi dilarang membangun. Masyarakat merasa mereka membangun diatas tanah yang menjadi hak miliknya. Pihak-pihak tertentu menjual tanah kavling yang berada pada zona pertanian di media sosial dan *e-commerce* tanpa melihat rencana tata ruang. Lahan sawah beririgasi teknis diurug dan dijadikan kavling-kavling perumahan. Masyarakat membeli lahan di zona pertanian dengan KDB 0%. Kemudian terjadi masalah ketika akan memproses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG sebagai syarat memperoleh Kredit Perumahan Rakyat (KPR) tidak bisa dikeluarkan dan masyarakat merasa dirugikan. Pelanggaran dilakukan karena masyarakat tidak mempunyai lahan lain untuk mendirikan bangunan (Arismayuda dkk, 2022) Pelanggaran juga disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya rencana tata ruang (Adrianus Zega, 2010). Terdapat ketidaktahuan serta kenekatan masyarakat dalam melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang (Pratiwi & Citra, 2019).

Siapa yang dapat disalahkan dalam hal ini? Masyarakat yang tidak mengetahui/memahami rencana tata ruang atau pemerintah yang belum mensosialisasikan dengan baik produk

rencana tata ruangnya? Fenomena tersebut menggambarkan kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam perencanaan pembangunan wilayah. Pelibatan masyarakat mungkin saja sudah dilakukan namun belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pengabaian terhadap peran masyarakat yang menimbulkan rendahnya peran masyarakat dalam penataan ruang akan mengakibatkan rendahnya rasa memiliki oleh masyarakat terhadap program pembangunan wilayah sehingga sangat menghambat keberlanjutan (*sustainability*) berbagai program penataan ruang (Adrianus Zega, 2010).

Munculnya berbagai permasalahan dalam tata ruang merupakan akibat dari kurangnya pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menentukan kesesuaian tata ruang dalam pembangunan kota kedepannya dan sebagai wadah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat itu sendiri (Dewi, Tan & Nazer 2019).

Dalam banyak kasus, masyarakat melakukan penolakan pembangunan walaupun sudah sesuai dengan rencana tata ruang. Konflik terjadi karena adanya posisi, kepentingan, dan kebutuhan antara setiap anggota yang tujuannya tidak sama dan berbeda-beda. Sedangkan masyarakat berada pada posisi sebagai yang terkena dampak dari dikeluarkannya kebijakan (Dwi et al., 2019). Output rencana tata ruang yang dihasilkan melalui proses partisipasi diharapkan dapat memperkecil derajat konflik. Peran serta masyarakat sangat berkontribusi untuk menghasilkan rencana tata ruang yang mampu menjawab kebutuhan berbagai kelompok masyarakat dengan tidak mengesampingkan kearifan lokal (Saragih 2011).

Pelibatan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan RDTR WP Selatan dilakukan dengan menyelenggarakan konsultasi publik. Berita Acara Konsultasi Publik merupakan syarat untuk memperoleh Persetujuan Substansi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KBPN) dalam penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) RDTR. Konsultasi publik yang disyaratkan adalah sebanyak 2 (dua) kali. Terdapat inkonsistensi antara persyaratan pengajuan persetujuan substansi dengan amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah. Penyampaian masukan diamanatkan pada tahap persiapan, tahap pengumpulan data dan analisis, tahap perumusan konsepsi rencana tata ruang dan penetapan rencana tata ruang. Konsultasi publik hanya formalitas. Tidak dapat dijamin masukan yang diberikan akan diakomodir. Masyarakat dianggap tidak berkompeten menyampaikan sumbangan pemikiran.

Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam kebijakan penyelenggaraan penataan ruang (Wardana et al., 2018). Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan awal dan nyata dari semua pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang sangat diperlukan karena dapat meningkatkan legitimasi dan kualitas peraturan rencana tata ruang yang dihasilkan, meningkatkan peluang untuk keberhasilan dalam penerapannya, meningkatkan ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut secara sukarela dan meningkatkan hubungan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat (R.A. DeRozarie, 2013).

Dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan RDTR perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat peran serta masyarakat, serta strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Harapannya adalah tercipta peraturan yang lebih implementatif dan ditaati oleh semua *stakeholder*.

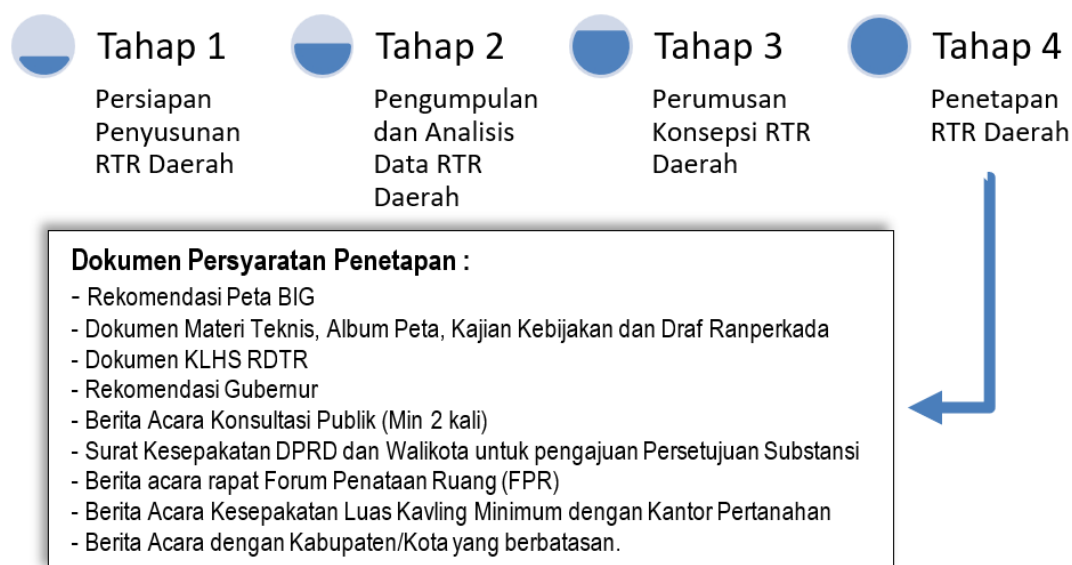
## Review Literatur

### a. Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Masyarakat dalam Permendagri No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, memiliki keahlian/keilmuan dibidang penataan ruang, memiliki pengalaman dibidang penataan ruang, dan/atau kegiatan pokoknya dibidang penataan ruang.

Berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2010 menjelaskan pengertian peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Menurut Ramos dan Roman dalam Yeung & McGee (1986) peran masyarakat berarti menyiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menerima tanggung jawab dan aktifitas tertentu. Peran serta masyarakat dalam penelitian ini dibatasi pada tahap Perencanaan Tata Ruang yaitu dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang sesuai amanat Permendagri No. 4 Tahun 2019 dilaksanakan dengan penyampaian masukan dan kerjasama dalam setiap tahapan pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang. Tahapan penyusunan dan Persyaratan Penetapan RDTR dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Tahapan Penyusunan dan Persyaratan Penetapan RDTR  
Sumber: Permendagri No. 4 Tahun 2019 dan Permen ATR No. 11 Tahun 2021

Penelitian terdahulu yang juga membahas tentang peran serta masyarakat dalam penyusunan RDTR adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuniartanti (2022). Penelitian tersebut hanya membahas bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RDTR. Bustomi & Suryadi (2022) juga mengukur peran serta masyarakat dalam penyusunan RDTR di Kecamatan Rajagaluh Makalengka. Penelitian tersebut mengukur derajat keterlibatan masyarakat dari variable-variabel tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan dan keaktifan yang mengacu pada tangga partisipasi masyarakat Sherry Arnstein. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi Tan & Nazer (2019) juga menggunakan tangga partisipasi masyarakat Sherry Arnstein untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi. Kedudukan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas tentang peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang secara lebih komprehensif yaitu terkait tingkat peran serta, faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta dan merumuskan strategi peningkatan peran serta masyarakat. Hal ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pengambil keputusan dalam menyusun rencana tata ruang yang mampu mengartikulasikan kebutuhan masyarakat.

#### **b. Tingkat Peran Serta Masyarakat**

Arnstein dalam Dewi, Tan & Nazer (2019) menyebutkan “*Citizen Participation is Citizen Power*”, partisipasi masyarakat adalah kekuatan dari masyarakat yang dijabarkan dalam tingkatan pendistribusian kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah. Tingkatan pendistribusian ini dikembangkan dalam bentuk tangga yang terdiri dari delapan anak tangga dan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama merupakan tahapan ‘*Non Participation*’ yang terdiri atas: 1) *Manipulation* dan 2) *Therapy*. Bagian kedua merupakan ‘*Degrees of Tokenism*’ yang terdiri atas: 3) *Informing*; 4) *Consultation*; dan 5) *Placation*. Bagian ketiga merupakan ‘*Degrees of Citizen Power*’ yang terdiri atas: 6) *Partnership*; 7) *Delegated Power*; dan 8) *Citizen Control*. Tangga partisipasi Arnstein juga digunakan dalam penelitian Hamdani (2020) dengan membandingkan antara ketersediaan ruang partisipasi publik dengan kewenangan yang diberikan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan.

Pengukuran Tingkat peran serta masyarakat dalam Yuniartanti (2022) diidentifikasi dari keikutsertaan masyarakat dalam setiap forum diskusi dan konsultasi publik. Penelitian lain melakukan pengukuran tingkat peran serta dengan analisis skoring (Maulana & Nurini, 2019). Skoring dilakukan terhadap sembilan parameter antara lain tingkat pengetahuan mengenai sejarah, kegiatan pelestarian, kehadiran dalam pertemuan warga, keaktifan saat pertemuan warga, keterlibatan dalam perumusan masalah, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, keterlibatan tenaga, keterlibatan dalam bentuk sumbangan, dan kemampuan mengelola kegiatan dimana setiap parameter memiliki tiga pilihan jawaban. Tingkat partisipasi masyarakat dibagi menjadi tiga kelas yaitu sedang, rendah, dan tinggi. Untuk mengelompokkan tingkat partisipasi individu dilakukan perhitungan interval.

#### **c. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat**

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat diperlukan untuk menentukan variable yang akan dinilai dalam matrik IFE dan EFE. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu

untuk menyusun strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang maka digunakan analisis SWOT, dimana matrik IFE dan EFE merupakan bagian dari proses analisis SWOT.

Menurut Yeung, McGee (1986:97-99) faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta adalah motivasi, kepemimpinan, kemampuan untuk melakukan *learning approach* dan kemampuan sumber daya di masyarakat. Maulana & Nurini (2019) menyatakan faktor internal yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, mata pencaharian, tingkat penghasilan, lama tinggal sedangkan faktor eksternal yaitu peran stakeholder. Faktor eksternal adalah peran pemerintah dalam pembinaan dan pemberian informasi, peranan konsultan perencana, dan peranan pihak swasta (Dewi et al., 2021; Nurbaiti & Bambang, 2017). Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat, penginformasian program, tokoh masyarakat, dan kesempatan berpartisipasi dalam program (Mumpuni et al., 2020).

Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat terjadinya peningkatan kesadaran warga masyarakat, yaitu: 1) Terbangunnya komitmen warga masyarakat; 2) Terbangunnya komitmen organisasi; 3) Terbangunnya komitmen aparat pemerintahan desa secara terbuka, responsif, dan akuntabel dalam perencanaan (Susetiawan et al., 2018). Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh kondisi social ekonomi masyarakat, penginformasian program, tokoh masyarakat, dan kesempatan berpartisipasi dalam program (Mumpuni et al., 2020).

Penggunaan teknologi digital juga merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat (Toukola & Ahola, 2022). Partisipasi elektronik (*e-participation*) berkontribusi pada diversifikasi proses informasi dan konsultasi (Akmentina, 2022). Faktor-faktor yang terletak pada aspek lingkungan, peserta dan penyelenggara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas Mobile Public Participation/MPP (Wang et al., 2021).

Pengembangan berkelanjutan Teknologi Informasi (TI) dan Artifisial Intelegence (AI) telah menawarkan cara baru partisipasi warga dalam perencanaan kota (Das, 2021). Teknologi informasi dan komunikasi mendorong pergeseran menuju paradigma perencanaan yang lebih interaktif, cerdas, mengatur diri sendiri, dan saling berhubungan (Potts, 2020). Hambatan utama untuk e-partisipasi di negara berkembang adalah sikap terhadap partisipasi, struktur dan budaya sistem perencanaan, dan kapasitas staf untuk melibatkan publik melalui e-partisipasi (Shahab et al., 2021). Niat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan kota menggunakan alat TIK yang berbeda, berbeda menurut variabel sosio-demografis ini menunjukkan efek dari strategi komunikasi yang berbeda pada keterlibatan warga (Li et al., 2020).

Aldegheishem (2023) berfokus pada empat faktor individu yaitu pengetahuan, kemauan individu untuk berpartisipasi, media sosial, dan budaya politik. Faktor motivasi, rasa memiliki yang kuat, memiliki kemampuan yang dibutuhkan, serta keinginan untuk meningkatkan perekonomian (Nabila & Purwohandoyo, 2021). Motivasi, pengetahuan tentang masalah, representasi kepentingan, topik partisipasi dan mode partisipasi (Correia et al., 2023).

Romawi & Fellnhofer (2022) menunjukkan bahwa terdapat tiga mekanisme untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat sipil, yaitu pertukaran informasi, umpan balik, dan

kolaborasi bersama. Saragih (2011) menyoroti perlunya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan untuk meminimalkan konflik antara pemangku kepentingan. Pengaruh sosial, manfaat yang dirasakan, dan faktor pendukung yang dirasakan merupakan tiga variabel signifikan yang berpengaruh langsung, sedangkan karakteristik pribadi, perolehan informasi, dan saluran konsultasi berpengaruh tidak langsung (Dai et al., 2022). Komunitas memainkan peran penting dalam meningkatkan kemauan warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan pengambilan tindakan (Shen et al., 2023).

Faktor utama yang menghambat implementasi rencana struktur perkotaan yaitu kurangnya partisipasi aktif masyarakat, komitmen, ketidakstabilan politik, anggaran, kepemilikan tanah adat, kesadaran, kualitas rencana, tenaga ahli, kurangnya kemajuan teknologi dan tata pemerintahan yang kurang baik (Negeri et al., 2023). Sedangkan menurut Wirawan & Nurpratiwi (2015) faktor pendukung perencanaan yaitu adanya dukungan aktif Masyarakat, sedangkan faktor penghambat yaitu keterbatasan anggaran. Menurut Sinaga, (2020), hambatan dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengaturan tata ruang disebabkan oleh Faktor internal seperti rendahnya pendidikan, pemahaman, kesadaran implementatif, konsistensi, dan komitmen, serta dari faktor eksternal seperti minimnya sosialisasi, kemudian pelibatan masyarakat yang hanya bersifat formalitas.

Untuk mengevaluasi efisiensi proses partisipasi, dipilih 13 parameter yang digunakan yaitu transparansi, keterbukaan, keterlibatan awal, kelengkapan, kontinuitas, keandalan, kompetensi, manfaat, visi bersama, pemerataan kekuasaan, saluran komunikasi, kemampuan beradaptasi, integritas, kesabaran dan ketekunan (Hassan et al., 2011). Sedangkan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dapat dilakukan dengan cara: 1) Peningkatan Kesadaran; 2) Advokasi Kebijakan; 3) Pengembangan Institusi, 4) Pengembangan Kapasitas (Rika Despica, 2014).

## Metode

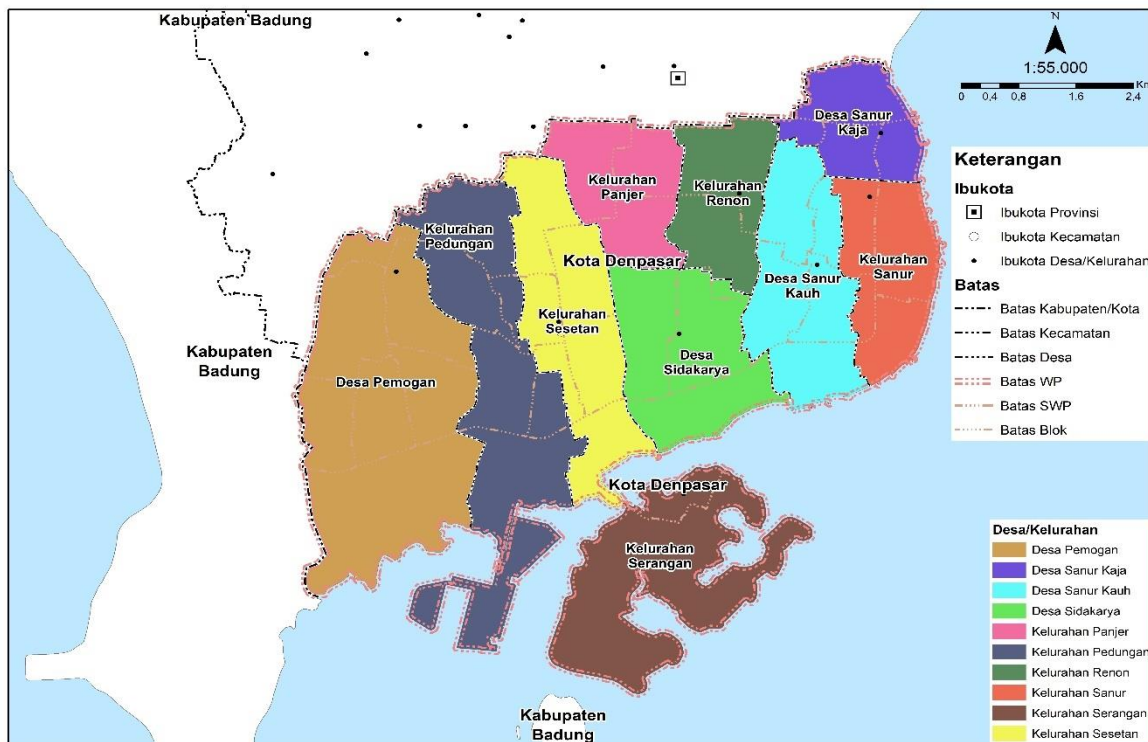
Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*) yaitu gabungan analisis kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan pengumpulan data sekunder dari instansi terkait. Data kuantitatif diperoleh dengan penyebaran kuisioner. Kuisioner diuji dengan uji validitas dan reliabilitas. Pengolahan data menggunakan analisis interval, skala likert, SPSS dan SWOT.

### a. Lokasi Penelitian

Terdapat 5 (lima) RDTR di Kota Denpasar yang sudah ditetapkan sebagai Peraturan Walikota yaitu RDTR WP Utara, RDTR WP Timur, RDTR WP Barat, RDTR WP Tengah dan RDTR WP Selatan. RDTR WP Selatan yang dipilih sebagai lokasi studi memiliki batas administrasi yang sama dengan Kecamatan Denpasar Selatan sehingga penggambaran posisi geografis yang diambil adalah posisi geografis Kecamatan Denpasar Selatan. Peta Lokasi Kecamatan Denpasar Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.

Menurut letak geografis, Kecamatan Denpasar Selatan berada antara 08 040' 00" - 08 044' 49" lintang selatan dan 115 011' 23" - 115 015' 54" bujur timur terdiri atas 10 Desa/Lurah dengan luas wilayah 4.978,34 ha. (Denpasar Dalam Angka 2021). WP Selatan dipilih karena

memiliki kompleksitas pemanfaatan ruang yang tinggi yaitu adanya Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Sanur, KEK Sanur dan KEK Serangan, Tahura Ngurah Rai, KSPN Sanur. Pembangunan di kawasan ini sering menimbulkan konflik dan gejolak sosial di Masyarakat.



**Gambar 2.** Peta Lokasi Kecamatan Denpasar Selatan  
Sumber: Perda No. 8 Tahun 2023 tentang RDTR WP Selatan

## b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi/pengamatan, penyebaran kuisioner, interview/wawancara, pengumpulan data sekunder ke instansi terkait, kemudian dilakukan pengolahan data dengan software SPSS untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuisioner yang dihasilkan. Program komputer Microsoft Excel juga digunakan untuk mengkompilasi data hasil kuisioner yang dikumpulkan.

## c. Teknik Sampling

Penelitian dilakukan pasca ditetapkannya RDTR WP Selatan menjadi Perwali. Populasi dalam penelitian ini adalah unsur-unsur yang dilibatkan dalam proses konsultasi publik tahap I dan tahap II penyusunan RDTR di Kota Denpasar. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Karakteristik responden dibagi menjadi 2 (dua) yaitu para pakar dan masyarakat. Sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.



**Tabel 1.** Jumlah Sampel Penelitian

No.	Populasi	Jumlah Sampel	Keterangan
<b>Responden Para Pakar</b>			
1.	DPRD	2	Anggota DPRD Dapil Denpasar Selatan dan Ketua Pansus XI RTRW Kota Denpasar
2.	Pemerintah Daerah	2	OPD Anggota Forum Penataan Ruang (FPR) yaitu DPUPR sebagai penyelenggara urusan penataan ruang dan Bappeda sebagai Badan Perencana pembangunan
3.	Perguruan Tinggi	2	UNUD, UNHI
4.	Asosiasi Perencana	2	Anggota IAP
5.	Swasta	2	LSM
<b>Responden Masyarakat</b>			
6.	Masyarakat	60	Perangkat Desa/Lurah/Tokoh Masyarakat/Kaling Kadus di Kecamatan Denpasar Selatan

Sumber : Data Primer (Peneliti, 2023)

#### d. Teknik Analisis Data

##### d.1 Penentuan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi Masyarakat dalam penelitian ini diukur dengan tingkat partisipasi menurut Sherry Arnstein (1969) yang terdiri dari delapan anak tangga yang terbagi atas tiga bagian. Bagian pertama merupakan tahapan *Non Participation*, bagian kedua merupakan *Degrees of Tokenism* dan bagian ketiga merupakan *Degrees of Citizen Power*. Pembagian tangga partisipasi dari Sherry Arnstein dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Kategori Tipologi Tangga Partisipasi Arnstein

No.	Kategori	Level Partisipasi	Penjelasan	Parameter
1.	<i>Non Participation</i>	<i>Manipulation</i>	Masyarakat dikumpulkan oleh Pemerintah sebagai wahana untuk mendidik dan mencari dukungan	Tidak memberikan masukan/saran/usul
		<i>Therapy</i>	sudah terjadi komunikasi satu arah dari pemerintah ke masyarakat yang bersifat terbatas	Memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja
2.	<i>Degrees of Tokenism</i>	<i>Informing</i>	Masih didominasi komunikasi satu arah, dimana pemerintah masih bersifat sebagai pemberi informasi kepada masyarakat tanpa ada kesempatan untuk memberikan umpan balik	Memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat
		<i>Consultation</i>	Masih didominasi komunikasi satu arah, dimana pemerintah masih bersifat sebagai pemberi informasi kepada masyarakat tanpa ada kesempatan untuk memberikan umpan balik	Memberikan masukan dengan cara dialog dua arah dengan pemerintah
		<i>Placation</i>	Sudah terjadi komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah, tapi masih hanya bersifat seremonial	Memberikan masukan dan usulannya diperhatikan sesuai dengan kebutuhan
3.	<i>Citizen Power</i>	<i>Partnership</i>	Keputusan diambil berdasarkan hasil komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat	Memberikan masukan dan tercapai kesamaan kepentingan dengan pemerintah
		<i>Delegated Power</i>	Pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus beberapa kepentingannya	Memberikan masukan dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana
		<i>Citizen Control</i>	Warga diberi keweangan sepenuhnya dalam mengelola kegiatan yang menyangkut kepentingan mereka tanpa campur tangan pemerintah	Memberikan masukan dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana

Sumber: Dewi Tan & Nazer, 2019

Karakteristik responden dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu responden pakar dan masyarakat. Jumlah sampel responden para pakar adalah 10 dan responden masyarakat adalah 60. Skor minimum responden pakar adalah 10 ( $10 \times 1$ ) dan skor maksimum ( $10 \times 8$ ) adalah 80, dengan jarak interval  $(80-10)/8 = 8,75$ . Skor minimum responden Masyarakat adalah 60 ( $60 \times 1$ ) dan skor maksimum ( $60 \times 8$ ) adalah 480. Dengan jarak interval, yaitu  $(480-60)/8 = 52,5$ . Skor minimum responden masyarakat dan pakar adalah 70 ( $70 \times 1$ ) dan skor maksimum ( $70 \times 8$ ) adalah 560, dengan jarak interval  $(560-70)/8 = 61,25$ . Besarnya interval skor untuk menentukan kategori tingkat peran serta masyarakat didasarkan pada skor kategori tingkat partisipasi individu dikalikan dengan jumlah sampel dengan rumus skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi jumlah kelas. Dalam hal ini jumlah kelas adalah 8 (delapan).

$$Interval = \frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{jumlah kelas}}$$

## d.2 Penentuan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Serta dan Strategi Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta diukur dengan kompilasi variabel faktor dari hasil studi literatur yang dijabarkan pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Variabel Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat

Variabel	Sub Variabel	Parameter
Motivasi		Kepedulian terhadap masalah perkotaan
		Ketertarikan/minat pribadi
		Pengaruh sosial/lingkungan
		Kurangnya informasi
		Tidak adanya media komunikasi yang efektif
		Rasa memiliki
		Kepercayaan
Pengetahuan		Kepentingan
		Tingkat Pendidikan
		Pengetahuan terkait isu perkotaan
		Pengetahuan tentang Kebijakan Rencana Tata Ruang
		Akses ke informasi perkotaan
		Saluran komunikasi tentang isu-isu perkotaan
Akses Informasi		Kapasitas untuk menyampaikan informasi
		Keaktifan menggunakan media sosial
		Tersedianya platform digital untuk berpartisipasi
Komitmen Pemerintah		Media sosial institusi yang aktif
		Media penyampaian informasi
	Alokasi Anggaran	Tersedianya anggaran penyebaran informasi
	Transparansi	Platform untuk memberikan informasi tata ruang kepada masyarakat
	Tenaga Ahli	
	Adanya <i>Feedback</i>	
	Teknis Penyebarluasan Informasi	Bahasa yang mudah dipahami Topik diskusi

Sumber: Yeung, McGee (1986:97-99); Maulana & Nurini (2019); Dewi et al. (2021); Nurbaiti & Bambang (2017); Mumpuni et al. (2020); Toukola & Ahola (2022); Li et al.,(2020); Aldegheishem, (2023); Romawi & Fellnhofner (2022); Dai et al. (2022); Wirawan & Nurpratiwi (2015); Rika Despica (2014).

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis merumuskan strategi Perusahaan (Solehah et al., 2022). Melalui analisis SWOT, variabel faktor-faktor pada Tabel 3 dikelompokkan mejadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal dan eksternal dituangkan dalam bentuk kuesioner dengan skala Likert 4. Analisis Likert 4, dimana masing-masing pernyataan memiliki rentang nilai 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rincian: Sangat Rendah/Sangat Tidak Berpengaruh = 1, Rendah/Tidak Berpengaruh = 2, Tinggi/Berpengaruh = 3, Sangat Tinggi/Sangat Berpengaruh = 4.

Hasil dari kuesioner ini selanjutnya dimasukkan dalam matriks IFE dan EFE untuk dilakukan perhitungan bobot, rating dan skor. Bobot adalah nilai rating dibagi jumlah seluruh rating, rating adalah jawaban responden (dari skala Likert ) dan skor adalah bobot dikali rating. Setelah total skor dari matriks IFE dan EFE diperoleh, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis matriks IE (internal eksternal).

Matriks IE digunakan untuk memperoleh strategi yang tepat agar hasil penilaian dapat menentukan posisi dan kekuatan bisnis (Fathia, Zahra et al. 2021). Matriks IE (internal external) merupakan matriks portofolio yang memposisikan perusahaan dalam tampilan sembilan sel (Erwiani, 2013). Matrik IE terdiri dari dua dimensi yaitu skor total dari Matrik IFE pada sumbu X dan skor total dari Matrik EFE pada sumbu Y (Umar, 1999:182). Menurut David (2009:345), Matriks IE dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yang mempunyai implikasi strategi yang berbeda-beda. Pertama, ketentuan untuk divisi-divisi yang masuk dalam sel I, II, atau IV dapat digambarkan sebagai tumbuh dan membangun (*grow and build*). Kedua, divisi-divisi yang masuk dalam sel III, V, atau VII dapat ditangani dengan baik melalui strategi menjaga dan mempertahankan (*hold and maintain*). Ketiga, ketentuan umum untuk divisi yang masuk dalam sel VI, VIII, atau IX adalah panen atau divestasi (*harvest or divest*).

**Tabel 3.** Matrik Internal Eksternal (IE Matrix)

		<b>Kuat 3,00-4,00</b>	<b>Sedang 2,00-2,99</b>	<b>Lemah 1,00-1,99</b>	
	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
<b>Tinggi 3,00-4,00</b>		I	II	III	
<b>Sedang 2,00-2,99</b>	<b>3</b>	IV	V	VI	
<b>Rendah 1,00-1,99</b>	<b>2</b>	VII	VIII	IX	
	<b>1</b>				

Sumber: (Fathia et al., 2021)

## Data, diskusi, dan hasil/temuan

### a. Tingkat Peran Serta Masyarakat

Dewi Tan & Nazer (2019) melakukan penilaian tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, dengan melihat kepada variabel: 1) Tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan; 2) Keaktifan dalam mengemukakan masukan/saran/usul; 3) Keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana; dan 4) Keterlibatan memberikan persetujuan terhadap

rancangan rencana sedangkan pada penelitian ini tingkat partisipasi diukur berdasarkan karakteristik responden yaitu para pakar dan masyarakat. Pada kasus penyusunan RDTR WP Selatan tidak dilakukan pelibatan masyarakat pada setiap tahapan proses penyusunan RDTR sehingga tidak dilakukan pengukuran untuk setiap tahapan seperti tersaji pada Gambar 1. Terdapat persamaan yaitu menggunakan tangga partisipasi dari Sherry Arnstein yang diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) pertanyaan sebagaimana telah diuraikan pada bagian teknik analisis data yang kemudian diberi skor dan dilakukan perhitungan jarak intervalnya.

Uji validitas terhadap kuisisioner tingkat peran serta masyarakat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nilai  $r$  hitung didapat dengan menggunakan aplikasi SPSS, sedangkan  $r$  tabel didapat dengan menggunakan tabel korelasi *product moment* dengan taraf signifikan 1%. Dengan total jumlah responden adalah 70 orang, maka diperoleh nilai  $r$  tabel adalah 0,306. Dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 1\%$  atau 0,01 maka hasil uji validitas kuisisioner menunjukkan angka 0,558.  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka kuisisioner dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas yang diperoleh menunjukkan angka *cronbach alpha* sebesar 0,701. Karena nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6, maka dapat dikatakan kuisisioner ini reliabel yang artinya dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menganalisis tingkat peran serta masyarakat dalam penyusunan RDTR WP Selatan Kota Denpasar.

Karakteristik responden dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu responden para pakar dan responden masyarakat. Tingkat peran serta untuk responden para pakar dengan jumlah sampel 10, dapat diketahui skor minimum adalah 10 ( $10 \times 1$ ) dan skor maksimum ( $10 \times 8$ ) adalah 80. Setelah diperoleh skor minimum dan maksimum maka diketahui pula jarak interval, yaitu  $(80-10)/8 = 8,75$ . Tingkat partisipasi pakar berdasarkan tipologi Arnstein disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Tingkat Peran Serta Para Pakar

No.	Kategori	Level Partisipasi	Interval	N	%	Bobot	N x Bobot
1.	<i>Non Participation</i>	<i>Manipulation</i>	10-18,74	0	0%	1	0
2.		<i>Therapy</i>	18,75-27,4	0	0%	2	0
3.	<i>Degrees of Tokenism</i>	<i>Informing</i>	27,5-36,24	2	20%	3	6
4.		<i>Consultation</i>	36,25-44,9	1	10%	4	4
5.		<i>Placation</i>	45-53,74	1	10%	5	5
6.	<i>Citizen Power</i>	<i>Partnership</i>	53,75-62,4	5	50%	6	30
7.		<i>Delegated Power</i>	62,5-71,24	0	0%	7	0
8.		<i>Citizen Control</i>	71,25-80	1	10%	8	8
<b>Total:</b>				10			<b>53</b>

Sumber : Hasil analisis peneliti 2024

Total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah 53. Skor tersebut menunjukkan tingkat peran serta masyarakat termasuk dalam kategori *placation* (tangga kelima dari delapan tangga Arnstein). *Placation* dapat diartikan bahwa:

1. Pada tingkat *placation*, komunikasi sudah berjalan baik antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah responden para pakar. Para pakar sudah sering dilibatkan dalam proses perencanaan tata ruang dalam hal *sharing* ilmu dan permintaan pertimbangan/masukan terhadap masalah-masalah perkotaan.

2. Pada tingkat *placation*, pemerintah tetap memiliki kewenangan dalam penilaian kelayakan terhadap suatu rencana atau program namun masyarakat tetap berhak memberikan pendapat dan terlibat dalam perencanaan.
3. *Placation* berada pada derajat *Degrees of Tokenism*. Pada bagian ini, peran serta masyarakat masih sangat kecil. Masyarakat memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, tapi tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dalam tingkatan hanya sebuah simbolis dalam mencapai tujuan.

Tingkat peran serta masyarakat dengan jumlah sampel 60 dapat diketahui skor minimum adalah 60 ( $60 \times 1$ ) dan skor maksimum ( $60 \times 8$ ) adalah 480. Dengan diketahuinya skor minimum dan maksimum maka diketahui pula jarak interval, yaitu  $(480-60)/8 = 52,5$ . Bila digunakan tipologi dari Arnstein, dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat yang tersaji pada Tabel 5.

**Tabel 5.** Tingkat Peran Serta Masyarakat

No.	Kategori	Level Partisipasi	Interval	N	%	Bobot	N x Bobot
1.	<i>Non Participation</i>	<i>Manipulation</i>	60-112,4	1	2%	1	1
2.		<i>Therapy</i>	112,5-164,9	0	0%	2	0
3.	<i>Degrees of Tokenism</i>	<i>Informing</i>	165-217,4	36	60%	3	108
4.		<i>Consultation</i>	217,5-269,9	7	12%	4	28
5.		<i>Placation</i>	270-322,4	10	17%	5	50
6.	<i>Citizen Power</i>	<i>Partnership</i>	322,5-374,9	6	10%	6	36
7.		<i>Delegated Power</i>	375-427,4	0	0%	7	0
8.		<i>Citizen Control</i>	427,5-480	0	0%	8	0
<b>Total:</b>				60			<b>223</b>

Sumber: Hasil Analisis Peneliti 2024

Total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah 223. Skor tersebut menunjukkan tingkat peran serta masyarakat termasuk dalam kategori *consultation* (tangga keempat dari delapan tangga Arnstein). *Consultation* dapat diartikan bahwa:

1. Pada tingkat konsultasi, sudah terjadi komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah, tapi masih hanya bersifat seremonial.
2. Pada tingkat *consultation*, tidak ada jaminan umpan balik yang diberikan masyarakat akan dapat memberikan perubahan terhadap keputusan yang akan diambil.
3. *Consultation* berada pada derajat *Degrees of Tokenism*. Pada bagian ini, peran serta masyarakat masih sangat kecil. Masyarakat memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, tapi tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dalam tingkatan hanya sebuah simbolis dalam mencapai tujuan.

Tingkat partisipasi gabungan dari keseluruhan responden dengan jumlah 70 orang dapat diketahui skor minimum adalah 70 ( $70 \times 1$ ) dan skor maksimum ( $70 \times 8$ ) adalah 560. Dengan diketahuinya skor minimum dan maksimum maka diketahui pula jarak interval, yaitu  $(560-70)/8 = 61,25$ .

**Tabel 6.** Tingkat Peran Serta Masyarakat dan Pakar

No.	Kategori	Level Partisipasi	Interval	N	%	Bobot	N x Bobot
1.	<i>Non Participation</i>	<i>Manipulation</i>	70 – 131,24	1	1%	1	1
2.		<i>Therapy</i>	131,25 – 192,4	0	0%	2	0
3.	<i>Degrees of Tokenism</i>	<i>Informing</i>	192,5 – 253,74	38	54%	3	114
4.		<i>Consultation</i>	253,75 – 314,9	8	11%	4	32
5.		<i>Placation</i>	315 – 376,24	11	16%	5	55
6.	<i>Citizen Power</i>	<i>Partnership</i>	376,25– 437,4	11	16%	6	66
7.		<i>Delegated Power</i>	437,5 – 498,74	0	0%	7	0
8.		<i>Citizen Control</i>	498,75 – 560	1	1%	8	8
<b>Total:</b>				70			<b>276</b>

Sumber: Hasil Analisis Peneliti 2024

Berdasarkan hasil perhitungan, total skor yang diperoleh dari hasil analisis keseluruhan responden adalah 276, maka tingkat peran serta masyarakat termasuk kategori *consultation* (tangga keempat dari delapan tangga Arnstein). Hal ini sama dengan tingkat peran serta responden stakeholder lainnya dimana tingkat *consultation* dapat diartikan bahwa:

1. Komunikasi dua arah sudah terjadi antara masyarakat dan pemerintah, tapi masih hanya bersifat seremonial.
2. Tidak ada jaminan umpan balik yang diberikan masyarakat akan dapat memberikan perubahan terhadap keputusan yang akan diambil.
3. *Consultation* berada pada derajat *Degrees of Tokenism*. Pada bagian ini, peran serta masyarakat masih sangat kecil. Masyarakat memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, tapi tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dalam tingkatan hanya sebuah simbolis dalam mencapai tujuan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat peran serta masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang khususnya pada penyusunan RDTR WP Selatan Kota Denpasar berada pada tingkat *consultation* yang masuk dalam kategori *Degrees of Tokenism*. Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu. Bahwa konsultasi publik dilaksanakan untuk memenuhi syarat pengajuan persetujuan substansi menteri ATR/KBPN. Persetujuan substansi sendiri merupakan syarat untuk dapat ditetapkannya RDTR menjadi peraturan walikota.

Dalam tangga Arnstein, tingkat partisipasi tertinggi adalah *citizen control* atau pengendalian warga. Pada tingkatan ini kewenangan penuh pengelolaan kegiatan ada di tangan masyarakat tanpa campur tangan pemerintah. Masyarakat adalah pengawas yang berhak menyampaikan teguran jika terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan. Namun dalam proses perencanaan tata ruang, *citizen control* tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan. Hal ini karena pemerintah memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan. Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Tingkat partisipasi yang paling ideal untuk diterapkan dalam proses perencanaan tata ruang adalah *partnership* atau kemitraan. Pada tahapan ini masyarakat dan pemerintah merupakan mitra. Masyarakat berhak melakukan negoisasi dengan pemerintah baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi. Keputusan diambil berdasarkan hasil komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. *Partnership* merupakan tiga tangga terakhir yang masuk dalam kategori *citizen power*. *Citizen power* (kekuatan masyarakat) merupakan gambaran dari bentuk tertinggi partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dimana diperoleh hasil tingkat peran serta masyarakat berada pada tingkat *consultation*. Masih diperlukan upaya untuk menaikkan level peran serta sebanyak 2 (dua) tingkat menuju *citizen power* dengan pola *partnersip*.

Implementasi pola *partnership* dalam sistem pemerintahan sudah dilakukan sejak lama yaitu adanya program *Open Government Partnership* (OGP). OGP diprakarsai pada tahun 2011 oleh delapan negara yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brasil, Filipina, Indonesia, Inggris, Meksiko, dan Norwegia. Indonesia menjadi Ketua OGP pada tahun 2013. Sebagai inisiatif global, OGP mempunyai 4 (empat) tujuan besar, yaitu: meningkatkan ketersediaan data tentang penyelenggaraan negara, mendukung partisipasi publik, mengimplementasikan standar tertinggi atas integritas profesional administrasi publik, meningkatkan akses atas teknologi baru untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas (Lukito, 2019).

Salah satu negara yang telah menerapkan pola *partnership* adalah Finlandia yang dilakukan dengan *quadruple helix model*. Penelitian yang dilakukan oleh Romawi & Fellnhofer (2022) membahas tentang kolaborasi dan kontribusi bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses perencanaan wilayah. Strategi kolaborasi *quadruple helix* semakin berkembang dengan adanya penambahan satu unsur lagi yaitu media sehingga menjadi strategi *pentahelix*. *Pentahelix* merupakan strategi yang melibatkan unsur-unsur masyarakat serta lembaga non-profit untuk mewujudkan suatu inovasi didukung dengan sumberdaya dan potensi yang ada. Strategi *pentahelix* di Indonesia dikenal dengan strategi ABCGM singkatan dari (*Academic, Bussiness, Community, Government and Media*). Strategi ini banyak diterapkan pada pengembangan sektor pariwisata.

## **b. Faktor-Faktor dan Strategi Peningkatan Peran Serta Masyarakat**

Uji validitas terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS terhadap 26 butir pertanyaan dalam kuisisioner yang telah disebar. Dengan total jumlah responden adalah 70 orang dan tingkat signifikansi 1% atau 0,01, maka diperoleh nilai  $r$  tabel adalah 0,306. Hasil uji validitas terhadap 26 butir pernyataan dalam kuisisioner diperoleh nilai sebanyak 24 pernyataan dinyatakan valid dengan  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sedangkan terdapat 2 butir pernyataan yang tidak valid dengan  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas terhadap 24 pernyataan yang valid. Hasil uji reliabilitas terhadap 24 variabel pertanyaan dalam kuisisioner diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,897 yang artinya lebih besar dari 0,6. Demikian pula rincian dalam setiap item pertanyaan juga menunjukkan hasil *Cronbach Alpha*  $>$  0,6 yang menunjukkan bahwa ke 24 pertanyaan reliable (konsisten).

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat berikut ini hanya mengukur 24 parameter. Selanjutnya dilakukan analisis SWOT dengan mengelompokkan parameter, kedalam matrik *Internal Factor Evaluation (IFE)* dan *External Factor Evaluation (EFE)*. Tabel 7 menyajikan hasil analisis IFE menunjukkan bahwa ada 12 faktor internal yang teridentifikasi, terdiri atas 6 faktor kekuatan dan 6 faktor yang menjadi kelemahan. Nilai faktor kekuatan sebesar 1,66 dan nilai faktor kelemahan sebesar 1,28. Nilai faktor kekuatan lebih tinggi dibanding faktor kelemahannya dengan total nilai matriks **IFE 2,93** (>2,5) yang juga menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyusunan RDTR WP Selatan berada di posisi yang baik. Kekuatan utama yang mempengaruhi peran serta yaitu kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap masalah perkotaan dengan skor 0,36. Kelemahan utama yaitu kurangnya informasi yang diterima dengan skor 0,29.

**Tabel 7.** Matrik *Internal Factor Evaluation (IFE)*

No.	Faktor Internal	Jumlah	Bobot	Rating	Bobot X Rating
<b>Strengths</b>					
1.	Kepedulian yang tinggi terhadap masalah perkotaan (P1)	246	0,10	3,51	0,36
2.	Adanya ketertarikan untuk ikut berperan dalam penyelesaian masalah-masalah perkotaan (P2)	244	0,10	3,49	0,35
3.	Rasa memiliki terhadap kondisi lingkungan sekitar (P6)	243	0,10	3,47	0,35
4.	Adanya kepentingan terkait masalah perkotaan (P8)	184	0,08	2,63	0,20
5.	Pemahaman terhadap rencana tata ruang (P10)	173	0,07	2,47	0,18
6.	Keaktifan di media sosial (P14)	195	0,08	2,79	0,22
	<b>Jumlah:</b>	<b>1285</b>	<b>0,53</b>	<b>18,35714</b>	<b>1,66</b>
<b>Weakness</b>					
1.	Kurangnya informasi yang diterima (P4)	220	0,09	3,14	0,29
2.	Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terhadap tindak lanjut dari saran yang diberikan (P7)	195	0,08	2,79	0,22
3.	Kurangnya pemahaman atau pengetahuan terhadap isu-isu perkotaan (P9)	193	0,08	2,76	0,22
4.	Kurangnya akses informasi tentang rencana tata ruang (P11)	174	0,07	2,49	0,18
5.	Kurangnya pengetahuan terkait saluran informasi untuk menyampaikan masalah-masalah perkotaan (P12)	180	0,07	2,57	0,19
6.	Rendahnya kapasitas untuk dapat menyampaikan informasi mengenai masalah-masalah perkotaan (P13)	172	0,07	2,46	0,17
	<b>Jumlah:</b>	<b>1134</b>	<b>0,47</b>	<b>16,2</b>	<b>1,28</b>
	<b>Jumlah Keseluruhan:</b>	<b>2419</b>	<b>1,00</b>		<b>2,93</b>

Sumber: Hasil Analisis Peneliti 2024

Hasil analisis EFE (Tabel 8) menunjukkan bahwa ada 12 faktor eksternal yang teridentifikasi, terdiri atas 6 faktor peluang dan 6 faktor yang menjadi ancaman. Nilai faktor peluang sebesar 1,59 dan nilai faktor ancaman sebesar 1,86. Nilai faktor peluang lebih kecil dibanding nilai faktor ancaman. Secara keseluruhan nilai EFE sebesar 3.45 (>2,5) hal ini



menunjukkan bahwa potensi peran serta masyarakat secara eksternal berada di posisi yang baik. Faktor peluang dengan skor terbesar (0,33 ) yaitu bahasa sosialisasi yang mudah dipahami. Faktor ancaman tertinggi yaitu kurangnya tenaga ahli sesuai kualifikasi dengan nilai rating sebesar 0,33. Keterbatasan tenaga ahli yang menguasai tata ruang menjadi kendala dalam upaya penyebarluasan informasi terkait tata ruang.

**Tabel 8.** Matrik Eksternal Factor Evaluation (EFE)

No.	Faktor Eksternal	Jumlah	Bobot	Rating	Bobot X Rating
<b>Opportunities</b>					
1.	Media Sosial Institusi yang Aktif (P16)	241	0,08	3,4	0,29
2.	Keragaman bentuk media penyebarluasan informasi (P17)	248	0,09	3,5	0,30
3.	Media komunikasi yang efektif (P5)	234	0,08	3,3	0,27
4.	Tersedianya platform digital untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan (P15)	238	0,08	3,4	0,28
5.	Bahasa sosialisasi yang mudah dipahami (P22)	259	0,09	3,7	0,33
6.	Pentingnya sosialisasi bagi peningkatan pengetahuan dan kesadaran menaati tata ruang	239	0,08	3,4	0,28
	<b>Jumlah:</b>	<b>1459</b>	<b>0,50</b>	<b>20,8</b>	<b>1,59</b>
<b>Threats</b>					
1.	Kurangnya komitmen pemerintah terkait alokasi anggaran (P18)	251	0,09	3,6	0,31
2.	Kurangnya transparansi pemerintah dalam memberikan informasi (P19)	245	0,08	3,5	0,30
3.	Kurangnya tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi (P20)	259	0,09	3,7	0,33
4.	Tidak adanya feedback terhadap hasil konsultasi publik (P21)	219	0,08	3,1	0,24
5.	Topik diskusi yang kurang menarik (P23)	239	0,08	3,4	0,28
6.	Pengaruh lingkungan sekitar terhadap ketertarikan terkait masalah-masalah perkotaan (P3)	224	0,08	3,2	0,25
	<b>Jumlah:</b>	<b>1437</b>	<b>0,50</b>	<b>20,5</b>	<b>1,86</b>
	<b>Jumlah Keseluruhan:</b>	<b>2896</b>	<b>1,00</b>		<b>3,45</b>

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

Selanjutnya untuk mengetahui posisi bisnis suatu organisasi digunakan matrik Internal External (IE) (Novita & Dina, 2018). Matrik IE terbagi menjadi sembilan sel yang didasarkan pada skor bobot IFE total pada sumbu x dan skor bobot EFE total pada sumbu y. Skor bobot IFE total pada sumbu x adalah 1,0 sampai 1,99 yang menunjukkan posisi internal lemah, skor 2,0 sampai 2,99 sedang, dan skor 3,0 sampai 4,0 adalah kuat. Sedangkan untuk sumbu y, skor bobot EFE total 1,0 sampai 1,99 masuk kategori rendah, skor 2,0 sampai 2,99 sedang, dan skor 3,0 hingga 4,0 adalah tinggi.

Jika posisi berada pada sel I, II, IV berarti tumbuh dan membangun (*grow and build*), sel III, V, VII berarti menjaga dan mempertahankan (*hold and maintain*) dan jika posisi berada pada sel VI, VIII, IX berarti panen dan divestasi (*harvest or divest*). Gambar 3 menunjukkan skor Matrik IFE sebesar 2,93 berada pada sumbu X yang menunjukkan posisi internal sedang. Skor matrik EFE sebesar 3,45 berada pada sumbu Y yang menunjukkan posisi eksternal kuat. Nilai matrik IFE dan EFE kemudian dimasukkan ke dalam Matrik Internal Eksternal

(IE) dan kemudian ditarik garis vertikal dan horisontal maka terjadi sebuah titik pertemuan pada sel II. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang di Kota Denpasar berada pada sel II, sehingga strategi yang tepat untuk digunakan yaitu strategi tumbuh dan membangun (*grow and build*) atau strategi pengembangan. Strategi yang diterapkan pada kondisi ini yaitu strategi intensif (penyebarluasan informasi, penguatan regulasi, dan inovasi) atau integratif (integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal (Rinaldi & Sulasti, 2022).

		Total Rata-Rata Tertimbang IFE		
		Kuat (3.0-4.0)	Rata-Rata (2.0-2.99)	Lemah (1.0-1.99)
Total Rata-Rata Tertimbang EFE	Kuat (3.0-4.0)	3.45	2.93	
	Rata-Rata (2.0-2.99)			
	Lemah (1.0-1.99)			

**Gambar 3.** Matriks Internal Eksternal  
 Sumber: Hasil Analisis Peneliti 2024

Tahap kedua adalah merumuskan alternatif strategi berdasarkan posisi peran serta masyarakat dalam penyusunan RDTR WP Selatan. Tahap ini menggunakan matriks SWOT (Tabel 9). Strategi SO yaitu mengoptimalkan kekuatan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Strategi WO bertujuan untuk mengurangi kelemahan dengan mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Strategi ST mengoptimalkan kekuatan untuk mengurangi dampak ancaman eksternal. Strategi WT dilakukan sebagai upaya pertahanan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal (Pertwi & Rahmawati, 2018).

**Tabel 9.** Matrik SWOT

Faktor Internal	Kekuatan (strength) (P1) (P2) (P6) (P8) (P14)	Kelemahan (Weakness) (P4) (P7) (P9) (P11) (P12) (P13)
Faktor Eksternal		
<b>Peluang (Opportunity)</b> (P16) (P17) (P5) (P15) (P22)	<b>Strategy S-O</b> 1. Penyediaan alternatif media untuk menyampaikan pendapat yang lebih beragam 2. Mengaktifkan social media institusi untuk penyebarluasan informasi 3. Merumuskan arah kebijakan yang mendukung upaya pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang 4. Menciptakan agen-agen sosialisasi bekerjasama dengan akademisi, asosiasi IAP dan LSM	<b>Strategy W-O</b> 1. Penyediaan sarana komunikasi yang efektif dan responsive untuk menanggapi keluhan Masyarakat 2. Pelaksanaan FGD/Konsultasi public dalam setiap tahap penyusunan dokumen rencana tata ruang 3. Penyampaian informasi dikemas lebih menarik dengan bahasa yang mudah dipahami disesuaikan dengan sasarannya

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan (strength) (P1) (P2) (P6) (P8) (P14)	Kelemahan (Weakness) (P4) (P7) (P9) (P11) (P12) (P13)
<b>Ancaman (Threats)</b>  (P19) (P20) (P21) (P22) (P23) (P3)	<b>Strategy S-T</b> 1. Meningkatkan komitmen pengalokasian anggaran penyebarluasan informasi terkait penataan ruang 2. Publikasi dokumen rencana tata ruang yang dapat diakses secara online 3. Meningkatkan kapasitas SDM dan berkolaborasi dengan Lembaga Pendidikan untuk menghasilkan tenaga ahli terkait penataan ruang	<b>Strategy W-T</b> 1. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses perencanaan tata ruang 2. Memberi ruang untuk seluruh lapisan masyarakat berkontribusi dalam perencanaan ruang 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menindaklanjuti setiap usulan, masukan maupun pengaduan yang ada

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

Integrasi alternatif strategi hasil analisis SWOT ke dalam strategi matriks IE Kuadran II (tumbuh dan berkembang) (Fathia et al., 2021b) yaitu strategi intensif penyebarluasan informasi yang terdiri atas strategi SO1, WO-2 dan WT-2, strategi intensif penguatan regulasi dan anggaran yang terdiri dari strategi SO-3, ST-1, WT-1, dan WT-3, strategi intensif inovasi yaitu strategi WO-1 dan WO-3. Strategi integrative terdiri atas strategi integrasi kedepan dengan rincian strategi SO-2 dan ST-2, strategi integrasi kebelakang terdiri atas strategi ST-3 dan strategi integrasi horizontal terdiri atas strategi SO-4.

## Kesimpulan

Tingkat peran serta masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang khususnya pada Penyusunan RDTR WP Selatan Kota Denpasar berada pada tingkat consultation yang masuk dalam kategori *Degrees of Tokenism*. Komunikasi dua arah sudah terjadi antara masyarakat dan pemerintah, tapi masih hanya bersifat seremonial. Peran serta dalam tingkatan ini tidak lebih dari suatu simbolis dalam mencapai tujuan. Perencanaan tata ruang khususnya Penyusunan RDTR WP Selatan dipengaruhi oleh faktor motivasi, pengetahuan, akses informasi dan komitmen pemerintah. Kekuatan utama yang mempengaruhi peran serta yaitu kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap masalah perkotaan dengan skor 0,38. Kelemahan utama yaitu kurangnya informasi yang diterima dengan skor 0,31. Faktor peluang dengan skor terbesar (0,36) yaitu bahasa sosialisasi yang mudah dipahami. Faktor ancaman tertinggi yaitu kurangnya tenaga ahli sesuai kualifikasi dengan nilai rating sebesar 0,36. Skor Matrik IFE sebesar 2,97 berada pada sumbu X yang menunjukkan posisi internal sedang. Skor matrik EFE sebesar 3,46 berada pada sumbu Y yang menunjukkan posisi eksternal kuat. Posisi pada matrik IE berada pada sel II sehingga strategi yang digunakan adalah strategi tumbuh dan membangun (*grow and build*) atau strategi pengembangan. Strategi yang diterapkan pada kondisi ini yaitu strategi intensif (penyebarluasan informasi, penguatan regulasi, dan inovasi) atau integratif (integrasi ke belakang yaitu meraih kendali atas alur penyampaian informasi, integrasi ke depan yaitu penguatan kapasitas SDM, dan integrasi horizontal yaitu kerjasama/*partnership*).

## Daftar Pustaka

Akmentina, L. (2022). E-Participation and Engagement in Urban Planning: Experiences from the Baltic Cities. *Urban Research and Practice*.  
<https://doi.org/10.1080/17535069.2022.2068965>

- Aldegheishem, A. (2023). Community Participation in Urban Planning Process in Saudi Arabia: an Empirical Assessment. *Journal of Urban Management*.  
<https://doi.org/10.1016/j.jum.2023.04.003>
- Arismayuda, I. M., Dewi, A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 564–571.  
<https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5584.564-571>
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar (2021). *Kecamatan Denpasar Selatan dalam Angka*. Denpasar: BPS Kota Denpasar.
- Correia, D., Feio, J. E., Marques, J., & Teixeira, L. (2023). Participatory Methodology Guidelines to Promote Citizens Participation in Decision-Making: Evidence Based on a Portuguese Case Study. *Cities*, 135.  
<https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104213>
- Dai, L., Han, Q., de Vries, B., & Wang, Y. (2022). Exploring key determinants of willingness to participate in EIA decision-making on urban infrastructure projects. *Sustainable Cities and Society*, 76. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103400>
- Das, A. (2021). *Urban Planning, Information Technology, and Artificial Intelligence: The Theory of Evolution*.  
<https://doi.org/10.20944/preprints202108.0228.v1>
- Dewi, L. S., Tan, F., & Nazer, M. (2019). Menapaki Tangga Arnstein dalam Perencanaan Tata Ruang (Studi Kasus Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi). *Jurnal Spasial*, 6(1), 19–26.  
<https://doi.org/10.22202/js.v6i1.3318>
- Dewi, L. S., Tan, F., & Nazer, M. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Bukittinggi. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2), 213.  
<https://doi.org/10.20961/region.v16i2.39852>
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar (2023). *Dokumen Neraca Pemanfaatan Lahan Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2023*.
- Dwi, M., Tajem, A., & Saribulan, N. (2019). Konflik Kepentingan dalam Kebijakan Reklamasi Kawasan Teluk Benoa Provinsi Bali Kajian tentang Konsep Tri Hita Karana. *Jurnal Kebijakan Pemerintah-FPP IPDN*, 2, 127–145.
- Erwiani. (2013). Analisis SWOT Sebagai Dasar Perumusan dan Penerapan Strategi pada Perusahaan (Studi Kasus di Telkom Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1.
- Fathia, A., Zahra, A., Wahyudin, W., & Nugraha, B. (2021a). The Implementation of the Strategy of Marketing Management through a SWOT Analysis with the Matrix of IFE, EFE, and IE. *Serambi Engineering*, VI(2), 1721–1729.
- Hamdani, R. S. (2020). Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(1), 43–62.  
<https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.43-62>
- Hassan, G. F., El Hefnawi, A., & El Refaie, M. (2011). Efficiency of participation in planning. *Alexandria Engineering Journal*, 50(2), 203–212.  
<https://doi.org/10.1016/j.aej.2011.03.004>
- Li, W., Feng, T., Timmermans, H. J. P., & Zhang, M. (2020). The Public's Acceptance of and Intention to Use ICTs when Participating in Urban Planning Processes. *Journal of Urban Technology*, 27(3), 55–73.  
<https://doi.org/10.1080/10630732.2020.1852816>
- Lukito, C. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Program Open Government Partnership di Kabupaten Bojonegoro*.

- Maulana, R., & Nurini, N. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Kampung Kauman Surakarta. *Tataloka*, 21(3), 473.  
<https://doi.org/10.14710/tataloka.21.3.473-481>
- Mumpuni, A., Rahayu, P., & Rini, E. F. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sungai (Studi Kasus: Sungai Pepe, Sungai Anyar, dan Sungai Premulung, Kota Surakarta). *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 15(1), 67.  
<https://doi.org/10.20961/region.v15i1.24976>
- Nabila, T., & Purwohandoyo, J. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata Tirtasari Sonsang Kabupaten Agam. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 16(1), 108.  
<https://doi.org/10.20961/region.v16i1.35219>
- Negeri, M. D., Guta, M. S., & Erena, S. H. (2023). Determinant Factors Hinder Urban Structure Plan Implementation: the Case of Nekemte Town, Ethiopia. *Heliyon*, 9(3).  
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13448>
- Novita, & Dina. (2018). Strategi Pengembangan Program Studi dalam Meningkatkan Perolehan Jumlah Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Manajemen Kinerja*, 4(1).
- Nurbaiti, S. R., & Bambang, A. N. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)*. (Vol. 14, Issue 1).
- Ogiana, G., & Sri Ronita Dewi, P. (2021). Peran Masyarakat Bali dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 2.  
<https://doi.org/10.51172/jbmb>
- Pertiwi, T., & Rahmawati, S. (2018). *Strategi KPU Kabupaten Bogor dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019*.
- Potts, R. (2020). Is a New Planning 3.0 Paradigm Emerging? Exploring the Relationship between Digital Technologies and Planning Theory and Practice. *Planning Theory and Practice*, 21, 272–289.  
<https://doi.org/10.1080/14649357.2020.1748699>
- Pratiwi, G. P. D. S., & Citra, I. P. A. (2019). Dinamika dan Kesesuaian Arah Fungsi Kawasan di Kota Denpasar. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 7(1).  
<https://doi.org/10.23887/jjpg.v7i1.20674>
- RADeRozarie, D. C. (2013). *Perspektif Kesejahteraan Masyarakat*. [www.derozarie.co.id](http://www.derozarie.co.id)
- Rika Despica. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah untuk Pembangunan Wilayah Kota Padang. *Jurnal Spasial Penelitian, Terapan Ilmu Geografi, dan Pendidikan Geografi*, 2.  
<https://doi.org/10.22202/js.v1i2.1577>
- Rinaldi, U., & Sulasti. (2022). Matrik-IE : Strategi Pemerintah Kota dalam Mengoptimalkan Potensi Penanaman Modal. *Jurnal Ekonomi Integra*, 12(2), 218-229.
- Romawi, M., & Fellnhofer, K. (2022). Facilitating the Participation of Civil Society in Regional Planning: Implementing Quadruple Helix Model in Finnish Regions. *Land Use Policy*, 112.  
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105864>
- Saragih, T. M. (2011). Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan. In *Konsep Partisipasi Masyarakat. Jurnal Sasi* (Vol. 17, Issue 3).
- Shahab, S., Bagheri, B., & Potts, R. (2021). Barriers to Employing e-Participation in the Iranian Planning System. *Cities* 116.  
<https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103281>

- Shen, J., Lu, T., & Luo, X. (2023). Urban Enclosure, Neighbourhood Commons, and Community Participation Willingness: Evidence from Shanghai, China. *Geoforum*, 141.  
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103719>
- Sinaga, E. J. (2020). *Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 242-260.  
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23717>
- Solehah, R., Destiarni, R. P., & Muti'ah, D. (2022). Strategi Pengembangan Bisnis UMKM Jamu Tradisional Madura melalui Pendekatan Analisis SWOT (Studi Kasus: UMKM Jamu Tradisional Madura di Kabupaten Pamekasan). *Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 8(1), 480–489.
- Susetiawan, S., Mulyono, D., & Roniardian, M. Y. (2018). Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 109.  
<https://doi.org/10.22146/jpkm.27512>
- Toukola, S., & Ahola, T. (2022). Digital Tools for Stakeholder Participation in Urban Development Projects. *Project Leadership and Society*, 3.  
<https://doi.org/10.1016/j.plas.2022.100053>
- Wang, X., Chen, Y., Han, Z., Yao, X., Gu, P., & Jiang, Y. (2021). Evaluation of Mobile-Based Public Participation in China's Urban Planning: Case Study of the Pinstreet Platform. *Cities*, 109.  
<https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102993>
- Wardana, A. A., Koeswahyono, I., & Permadi, I. (2018). Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Ruang. *Law Review*, XVIII(1).
- Wirawan, R., & Nurpratiwi, R. (2015). *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. 4(2), 301.
- World Resource Institute (2023). *Laporan Penilaian Kesiapan Pemerintah dan Masyarakat pada Implementasi Solusi Berbasis Alam*.
- Yeung, Y., & McGee, T. G. (1986). *Community Participation in Delivering Urban Services in Asia*. International Development Research Centre.
- Yuniartanti, R.K. 2022. Perencanaan Partisipatif dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Waisai, Raja Ampat, Papua. *Reksabumi*, 1(2), 12–29.  
<https://doi.org/10.33830/reksabumi.v1i2.2881.2022>
- Zega, A. (2010). Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, dan Pembelajarannya*, 4(2), 1-21.

### Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), karena atas asung wara nugraha yang diberikan oleh Nya, Penelitian yang berjudul Peran Serta Masyarakat Dalam Penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Selatan Kota Denpasar dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Ir. Ni Putu Pandawani, M.Si., selaku pembimbing utama yang penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan bimbingan, semangat, dorongan, dan masukan-masukan penting selama penyusunan usulan penelitian tesis ini. Terima kasih kepada Dr. Eng. I GD. Yudha Partama, S.Si., M.Si., selaku anggota komisi pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan saran kepada penulis, serta seluruh kontributor yang telah mendukung penulis selama menempuh pendidikan Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Perdesaan di Pascasarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar.